

Analisa proses diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh penyidik di wilayah Polres Metro Jakarta Pusat = Analysis of the diversion a on child in conflict with law by investigator in the area of the departmental police of central Jakarta

Tika Pusvita Sari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20477207&lokasi=lokal>

Abstrak

Berbagai dampak negatif akibat anak bersentuhan dengan dunia peradilan menjadipertimbangan utama dimungkinkannya diversifikasi terhadap penyelesaian kejahatan yang dilakukan oleh anak. Dalam melaksanakan fungsi sebagai kontrol sosial itu, Polrimembentuk suatu unit khusus yang menangani permasalahan perempuan anak yang disebut Unit PPA Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Secara khusus unit iniifocus pada bagaimana memberikan layanan untuk kepentingan terbaik bagi anak danuntuk menegakan keadilan bagi perempuan dan anak. Unit PPA ini beranggotakanpenyidik yang diwajibkan untuk mengedepankan proses diversifikasi dibandingkanmeneruskan proses hukum pelaku anak hingga ke pengadilan anak. Berkenaan denganpenyidik kepolisian dalam menerapkan konsep diversifikasi terhadap anak yangberhadapan dengan hukum dapat dikaji permasalahan mengenai bagaimanakah proses pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya pelakuanak, pengaturan posisi dan wewenang penyidik kepolisian dalam pelaksanaan diversiserta tantangan yang dihadapi penyidik dalam penerapan diversifikasi dan strategi untukmengawasinya di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative yang didukung dengan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan informan, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat lebih mengutamakan upaya damai atau menggunakan cara diversifikasi dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum dari pada proses secara hukum karena lebih baik mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak. Banyaknya para penegak hukum yang masih berparadigma legalistik, kaku, dan kurangnya pemahaman tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Budaya masyarakat Indonesia yang dikenal dengan musyawarahnya, akan tetapi hal tersebut terkadang sama sekali tidak terlihat dalam upaya diversifikasi yang melibatkan pelakuanak. Kurangnya koordinasi antar instansi terutama pengawasan pasca diversifikasi menyebabkan dampak negatif terhadap anak seperti stigmatisasi kerap dialami oleh pelaku anak.

Negative impacts on children that arise from their contact with the world of law justice are a major consideration in the diversion of the settlement of child crimes. In carrying out its function as social controller, the Police formed a special unit to handle issues of women and children called Unit PPA Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Service Unit for Women and Children that, in particular, focuses on how to provide services for the best interests of children and to uphold justice for women and children. This unit consists of investigators who are required to prioritize the diversion process rather than continuing the legal proceedings of juvenile offenders to the juvenile court. With regard to the investigators in applying the concept of diversion to children in conflict with the law, it may be possible to examine the issues of how are the processes of implementing the diversion to children in conflict with the law, in particular juvenile offenders, setting the position and authority of investigators in the implementation of diversions, and what

kinds of challenges faced by investigators in implementing the diversions and strategies they take in the Central Jakarta Departmental Police jurisdiction.

This study used normative juridical research supported by field research that was conducted by conducting interviews with informants. Meanwhile, the data analysis used was qualitative analysis with primary and secondary data collection methods. From the results of this study, it can be concluded that the Central Jakarta Departmental Police have prioritized peaceful efforts or used diversions in dealing with children in conflict with the law rather than legal process because it is better to prioritize the best interests for children. Many law enforcement officials still have a legalistic, rigid, and inadequate paradigm about the handling of children in conflict with the law. The culture of Indonesian society, actually, is known for its deliberation, but it is sometimes not at all visible in diversionary efforts involving juvenile offenders. The lack of coordination between agencies, especially in post diversion monitoring, has a negative impact on juvenile offenders such as poor stigmatization.